

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Negara Indonesia dalam asasnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Implementasi keinginan masyarakat dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan secara bebas dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan

penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan secara bebas harus tetap memperhatikan hak-hak kebebasan orang lain dan menghormati serta menaati peraturan dan norma yang ada. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 6 Undang –Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang menyatakan :

Bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian dalam menyampaikan kebebasan berpikir secara lisan dan tulisan secara bebas yang dilakukan oleh masyarakat juga perlu mendapat pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang memicu disintegrasi sosial. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah diatur dalam Pasal 7 Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yakni untuk, (1) Melindungi hak asasi manusia, (2) Menghargai asas legalitas, (3) Menghargai prinsip praduga tindakan bersalah, dan (4) Menyelenggarakan pengamanan.

Dalam pelaksanaan penyampaian pikiran secara lisan maupun tulisan masyarakat juga perlu memperhatikan beberapa peraturan mengenai hal-hal yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang berbunyi:

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
  - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. pawai;
  - c. rapat umum; dan atau
  - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum. kecuali :
  - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
  - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Setiap negara diseluruh dunia memiliki sistem negaranya sendiri untuk menciptakan kehidupan yang ideal, salah satu diantaranya adalah sistem demokrasi. Sistem ini banyak diterapkan diberbagai negara, hingga kini dan dianggap sebagai suatu sistem yang ideal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disuatu negara salah satunya di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam

menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah kebebasan dan persamaan. Menurut Sargent bahwa demokrasi mengisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara demokrasi diperkuat dengan penerapan hukum hal itu didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan “*Indonesia adalah negara hukum*” , dan dalam konsep demokrasi tentunya juga didasarkan pada UUD 1945 pada pasal 1 ayat (2) berbunyi “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar UUD 1945*”. Demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dia memberikan banyak arti penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman.

Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menyatakan “*Hak setiap*

---

<sup>1</sup> Fatah, R.E.S. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

*warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat. Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi, kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Bahwa kebebasan bertanggungjawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum*”.

Pada Resolusi Majelis Umum PBB No 6/27 yang menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan :

*“Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang di ekspresikan secara bebas untuk meentukan sistem- sistem politik, ekonomi, sosial dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.”*

Dalam konsep ini tentunya memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia menggunakan kedaulatannya dalam berpartisipasi terhadap perkembangan negara. Mengenai kedaulatan dalam konsep demokrasi ini salahsatunya terkait kebebasan berpendapat bagi masyarakat.

Kebebasan pendapat merupakan satu langkah atau cara dalam mengemukakan sumbangsih pemikiran dalam menganalisa, menggali dan menelaah apa yang menjadi aspirasi dan keluhan dimasyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat ini, negara memberi kesempatan dan menjamin hak kepada masyarakat dalam mengaspirasikan pemikirannya yang dalam pelaksanaannya dijamin dalam hukum. Kebebasan berpendapat sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan:<sup>2</sup>

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Cara-cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar tentu sudah diatur pemerintah di dalam undang-undang. Demonstrasi, pawai, mimbar bebas, dan rapat umum adalah bentuk penyampaian pendapat secara baik dan benar. Tetapi tentu saja pendapat yang akan dikemukakan harus jelas dan terarah supaya tidak terjadi kericuhan dalam pelaksanaannya. Berpendapat yang baik dan benar pun harus memuat maksud dan tujuan yang jelas, tempat lokasi dan rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, dan jumlah peserta. Hal-hal tersebut dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadi aksi anarkis dari para peserta. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 28 UUD 1945.<sup>3</sup>

Salah satu bukti implementasi berkebebasan berpendapat di Indonesia yang sering kita jumpai adalah unjuk rasa. Unjuk rasa sendiri merupakan implementasi dari prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan berbagai macam perbedaan yang ada mulai dari perbedaan kepercayaan, pandangan politik, adat, dan lain-lain. Namun, dengan diimplementasikan kebebasan berpendapat dengan cara unjuk rasa menimbulkan berbagai penyimpangan yang sulit untuk dikendalikan, seperti keikutsertaan anak dibawah umur dalam kegiatan unjuk rasa tersebut. Padahal keterlibatan anak dalam unjuk rasa telah diatur secara jelas dalam Pasal 15 UU Nomer 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan:

---

<sup>3</sup> Pasal 28 UUD 1945

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusushan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Keikutsertaan anak dalam aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyalagunaan dalam kegiatan politik. Tidak menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, termasuk juga tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang berpotensi rusuh dan tidak melibatkan anak dalam kegiatan yang mengandung unsur kekerasan. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka anak-anak sangat rentan menjadi korban. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 yang intinya meminta pihak-pihak terkait untuk mencegah mahasiswa keluar sekolah untuk demo. Surat ini ditandatangani dua hari setelah pelajar ikut demo.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa alasan anak belum bisa mengikuti kegiatan unjuk rasa adalah siswa atau anak dibawah umur harus dilindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

---

<sup>4</sup>Rio Apinino, Demonstrasi Pelajar yang Tak Bisa Dicegah Siapa pun, <https://tirto.id/eiZB>, diakses pada 18 Nov. 2019



Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yakni Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

”Masih hangat isu tersebut, tiba-tiba dalam aksi unjuk rasa pendukung Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertangkap kamera banyak sekali anak usia dini atau dibawah umur ikut berdemo membawa spanduk dan bendera di halaman Gedung KPK Merah Putih. Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mereka yang masih dibawah umur itu dilarang terlibat aksi unjuk rasa, apapun alasannya. Tapi kenyataannya, dalam aksi unjuk rasa kemarin, sejumlah anak nampak nyata berbaris rapih membawa spanduk dan bendera sambil meneriakkan dukungan terhadap Revisi UU KPK.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Miechell Octovy Koagouw, *Anak Dibawah Umur Ikut Unjuk Rasa, Eksploitasi Atau Bukan?*, <http://rri.co.id/>, diakses pada 5 november 2019

Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”.<sup>6</sup>

Dalam beberapa kesempatan, tak sedikit anak-anak yang sengaja diajak turun langsung menyampaikan aspirasi dalam aksi unjuk rasa. Seperti unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada September 2019 kemarin. Beberapa siswa mengakui hendak mengikuti aksi demonstrasi yang tersebar lewat broadcast di media sosial. Lewat handphone, mereka sebagian diketahui adanya ajakan untuk datang dalam aksi di Depan Gedung DPRD tanpa mengetahui tujuan dan maksud demonya. Dalam razia polisi juga menemukan senjata tajam dalam bentuk gergaji yang diletakkan di dalam jok sepeda motor. Pemiliknya mengaku membawa senjata tersebut untuk memotong skok sepeda motornya. Dua pengendara diketahui membawa senjata tajam di dalam joknya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk mencoba mengetahui serta menganalisis bagaimana Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak dalam keikutsertaan anak mengikuti unjuk rasa di Kota Malang.

---

<sup>6</sup>Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998

<sup>7</sup> Darmadi Sasongko, *Polisi Gagal Siswa SMP & SMA Ikut Demo di Malang*, <https://www.merdeka.com/>, diakses pada 18 Nov. 2019

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam mengikuti kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa Kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang mengikuti kegiatan politik di wilayah Polres Kota Malang?

## **C. Tujuan**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan dapat berguna bagi kita semua, demikianpun dengan skripsi ini, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam mengikuti kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik di wilayah Polres Kota Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### **a. Bagi Penulis**

Yaitu untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam mengikuti kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Untuk

mengetahui apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik.

b. Bagi Anak

Yaitu agar anak lebih bijak dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada.

c. Bagi Masyarakat

Yaitu masyarakat akan lebih memahami bagaimana peran dan tanggung jawab hukum dalam melindungi anak atau remaja yang belum cakap hukum untuk mengikuti kegiatan politik.

**E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi bagi Kepolisian Resor Kota Malang dan sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait khususnya Kepolisian Resor Kota Malang dalam meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas Kepolisian Resor Kota Malang. Sehingga bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan mnambah wawasan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpikir dan bertindak dalam lingkungannya.

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menambah pengetahuan bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Kegiatan

Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>8</sup>

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif disebut "*Social Legal Research*".<sup>9</sup>

Penelitian yuridis empiris/sosiologis yang artinya cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Alasan penulis memilih lokasi di Kepolisian Resor Kota Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 adalah karena di Kota Malang

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 112

<sup>9</sup> Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 3

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 52

menjadi sala satu kota dimana terjadinya kasus anak dibawah umur terlibat dalam unjuk rasa. Hal tersebut dapat diketahui melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik pada bulan September 2019.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 tipe bahan hukum yakni :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau pihak-pihak yang terkait melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres Malang yang dilakukan dengan wawancara atau interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, maksudnya pertanyaan telah disusun dan di siapkan sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada. Data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum untuk menunjang kelengkapan tulisan ini, yaitu :

##### **1.) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden (PP) No.61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

## 2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa studi pustaka, hasil penelitian terdahulu, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil seminar dan lain sebagainya.

## 3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah :

- a.) Studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang terkait dengan penelitian.

b.) Wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait, dilakukan di Kepolisian Resor Kota Malang yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu.

c.) Studi pustaka, yaitu pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian dalam hal ini data di dapat dari literatur-literatur yang dianggap dapat membantu dalam analisa terkait Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **5. Analisa Data**

Data yang terkumpul baik secara primer maupun sekunder semuanya akan di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisa tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Politik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini penulis akan menganalisa antara *da sollen* dan *da sein*. Dengan mengkonstruksikan penerapan peraturan perundang-undangan telah sesuai atau tidak berdasarkan fakta di lapangan terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam mengikuti kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang terlibat dalam mengikuti kegiatan politik.



## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam empat bab yang di dalamnya terdiri dari sub-bab sub-bab, sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut serta berisi gambaran permasalahan yang akan penulis teliti. Selain itu juga sebagai pengantar dalam memahami penulisan penelitian ini, yang keseluruhannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,kegunaan penulisan,metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini. Diantaranya adalahteori perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang unjuk rasa, tinjauan umum tentang demokrasi dan undang-undang mengenai perlindungan anak.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan objek yakni

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur dalam mengikuti kegiatan politik menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa saja kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang mengikuti kegiatan politik.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

